

Panjang tulisan maksimum 4.000 karakter. Materi dikirim via e-mail opini@tribunjabar.co.id, tribunjabar@yahoo.com, atau kirim langsung ke redaksi *Tribun Jabar* di Jalan Malabar No 5 Bandung menggunakan CD atau disket. Sertakan foto diri, fotokopi identitas yang masih berlaku, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Bandung Masih Kota Terkorup?

MENGEJUTKAN, dalam kondisi semangat membangun Kota Bandung sebagai Kota Bermartabat muncul hasil survei KPK yang memosisikan Kota Bandung di urutan kedua dengan skor integritas terendah. Lebih spesifik, Kota Bandung menduduki urutan pertama dari 12 pemerintah kabupaten/kota yang semua unit layanan sampelnya memiliki nilai integritas di bawah rata-rata.

Pertama, pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketiga, pelayanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Keempat, pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Siapa pun yang jadi responden dalam survei tersebut, yang jelas mereka belum merasa puas dengan pelayanan publik yang diberikan.

Akankah hasil survei tersebut menimbulkan efek negatif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Kota Bandung? Bagaimana seharusnya Pemerintah Kota Bandung merespons hasil survei tersebut melalui karya nyata yang akan memperbaiki status ke depannya?

Rendahnya nilai integritas pelayanan publik dilihat dari petugas pelayanan publik yang masih bersikap koruptif. Kata masih mengisyaratkan, perilaku korup tersebut melegenda, dari dulu sudah ada dan sampai saat ini belum hilang, tetap melekat dalam proses pelayanan publik. Padahal upaya *good governance* tertuang dalam renstra, yakni meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Hal itu tercermin dalam jargon



referat

ATIHR DARIAH
Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi Unisba

Kota Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat).

Bersahabat tentunya bagi seluruh masyarakat. Namun nyatanya hasil survei menginformasikan bahwa masyarakat merasakan perbedaan perlakuan petugas dalam melakukan pelayanan. Pengguna layanan akan dipersulit apabila tidak memberi imbalan atau biaya tambahan kepada petu-

masalah ini.

Buktinya, dalam kondisi seperti itu, ekonomi Kota Bandung dapat tumbuh tinggi mencapai angka di atas tujuh persen dalam lima tahun terakhir, jauh melebihi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa para pengusaha sudah memperhitungkan biaya transaksi "pelicin" dalam bisnis mereka karena kuat-

sehingga membentuk angka pertumbuhan ekonomi yang fantastis. Sebab, sebagian besar pelaku usaha di Kota Bandung merupakan skala kecil dan mikro yang sangat kesulitan mengembangkan usahanya, termasuk menghadapi biaya transaksi.

Jadi, buruknya pelayanan publik tidak secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tapi akan memperlebar ketimpangan baik tingkat partisipasi maupun kesempatan menikmati kue pertumbuhan ekonomi.

Artinya, eksistensi paradoks pembangunan ekonomi semakin kuat, ekonomi tumbuh tinggi di satu sisi, sementara di sisi lain kemiskinan tetap tinggi karena rendahnya daya beli masyarakat. Faktanya demikian, daya beli masyarakat Kota Bandung lebih rendah dari Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, sasaran pembangunan ekonomi, yakni maksimisasi *social welfare* tak tercapai, artinya sesungguhnya pembangunan gagal.

Kasus eksklusif Kota Bandung yang demikian, yakni kondisi pelayanan publik buruk tapi ekonomi bisa tumbuh tinggi karena kuatnya daya tarik ekonomi kota, bukan berarti aman karena dalam jangka panjang bisa runtuh. Mengapa demikian?

Berdasarkan pemikiran Thurow (1999) tentang piramida kemakmuran yang terdiri dari enam fondasi, fondasi dasar dari kemakmuran suatu bangsa adalah *social organization*. Aspek ini sangat mendasar karena terkait dengan kemampuan pemerintah mengorganisasi ketersediaan fasilitas publik seperti membangun dan memperbaiki

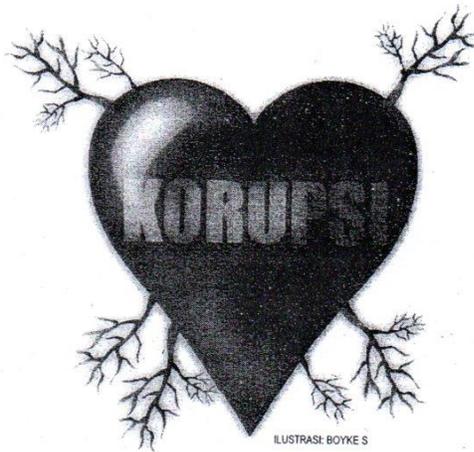
infrastruktur, pengembangan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan demokratisasi, dan fasilitas publik lainnya. Termasuk di dalamnya menyediakan pelayanan publik yang memadai, efisien, dan optimal.

Ini artinya, ketika fondasi dasar tak terbangun dengan kuat, piramida kemakmuran jadi rapuh, bahkan diprediksi takkan mampu mencapai sasaran yang diinginkan, yakni kemakmuran bersama.

Perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia memberikan *lesson learnt* (pembelajaran) yang sangat berarti, ternyata pertumbuhan ekonomi yang mantap di periode awal 1990-an mendorong terjebak dalam krisis yang belum pulih sempurna sampai saat ini karena akar masalah utama, yakni lemahnya kelembagaan yang tercermin dalam budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Jika jajaran Pemerintah Kota Bandung memahami makna pembangunan ekonomi secara komprehensif, sudah sepantasnya menyikapi hasil survei dengan inovasi kelembagaan yang mengarah pada perbaikan dan peningkatan pelayanan publik sesegera mungkin. Tak perlu rumusan yang ideal tapi klise dan sebatas retorika. Mulailah dengan yang sederhana tapi konkret dan jelas, misalnya akses mudah, penetapan batas waktu yang jelas dan pasti, tarif rendah dalam urusan administrasi.

Hikmah hasil survei merupakan *warning* untuk serius meningkatkan pelayanan publik. KPK akan terus memantau jangan sampai tahun depan tetap teridentifikasi sebagai kota terburuk pelayanan publiknya. (*)



ILUSTRASI: BOYKE S

gas. Artinya, upaya-upaya tersebut jauh dari optimal.

Perubahan kelembagaan yang mengarah pada peningkatan kualitas interaksi merupakan proses yang butuh waktu, keseriusan, dan konsistensi yang tinggi. Tak mudah dalam waktu pendek mengubah perilaku yang sudah jadi tradisi, apalagi sikap masyarakat yang permisif terhadap

nya daya tarik Kota Bandung, terutama untuk pengembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa terkait dengan identitas yang disandangnya sebagai kota wisata kuliner dan *benchmark fashion*.

Namun perlu kita cermati pengusaha yang mana yang dimaksud yang bisa bermain dan ambil peran

Bandung Masih Kota Terkorup?

Atih R Dariah

Mengejutkan, dalam kondisi semangat membangun Kota Bandung sebagai Kota Bermartabat muncul hasil survei KPK yang memposisikan Kota Bandung di urutan kedua dengan skor integritas terendah. Lebih spesifik, Kota Bandung menduduki urutan pertama dari 12 pemerintah kabupaten/kota yang seluruh unit layanan sampelnya memiliki nilai integritas di bawah rata-rata. Pertama, pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketiga, pelayanan pembuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Keempat, dari pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Siapapun yang jadi responden dalam survey tersebut, yang jelas mereka belum merasa puas dengan pelayanan publik yang diberikan. Akankah hasil survey tersebut menimbulkan efek negatif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Kota Bandung? Bagaimana seharusnya Pemerintah Kota Bandung merespon hasil survey tersebut melalui karya nyata yang akan memperbaiki status ke depannya?

Rendahnya nilai integritas pelayanan publik dilihat dari petugas pelayanan publik yang **masih** bersikap koruptif. Kata masih mengisyaratkan bahwa perilaku korup tersebut melegenda, dari dulu sudah ada dan sampai saat ini belum hilang, tetap melekat dalam proses pelayanan publik. Padahal upaya *good governance* tertuang dalam renstra yakni meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Tercermin dalam jargon Kota Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat). Bersahabat tentunya bagi seluruh masyarakat. Namun nyatanya hasil survey menginformasikan bahwa masyarakat merasakan perbedaan perlakuan petugas dalam melakukan pelayanan. Pengguna layanan akan dipersulit apabila tidak memberi imbalan atau biaya tambahan kepada petugas. Artinya, upaya-upaya tersebut jauh dari optimal. Perubahan kelembagaan yang mengarah pada peningkatan kualitas interaksi merupakan proses yang butuh waktu, keseriusan dan konsistensi yang tinggi. Tidak mudah dalam waktu pendek mengubah perilaku yang sudah menjadi tradisi apalagi sikap masyarakat yang permisif terhadap masalah ini. Buktinya, dalam kondisi seperti itu, ekonomi Kota Bandung dapat tumbuh tinggi mencapai angka di atas 7% dalam 5 tahun terakhir, jauh melebihi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa para pengusaha sudah memperhitungkan biaya transaksi 'pelicin' dalam bisnis mereka karena kuatnya daya tarik

Kota Bandung terutama untuk pengembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa terkait dengan identitas yang disandangnya sebagai kota wisata kuliner dan *benchmark* fashion. Namun kita perlu cermati pengusaha yang mana yang dimaksud yang bisa bermain dan ambil peran sehingga membentuk angka pertumbuhan ekonomi yang fantastis? Karena sebagian besar pelaku usaha di Kota Bandung merupakan usaha skala kecil dan mikro yang sangat kesulitan dalam mengembangkan usahanya termasuk menghadapi biaya transaksi. Jadi buruknya pelayanan publik tampaknya tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun akan memperlebar ketimpangan baik tingkat partisipasi maupun kesempatan menikmati kue pertumbuhan ekonomi. Artinya eksistensi paradoks pembangunan ekonomi semakin kuat, ekonomi tumbuh tinggi di satu sisi, sementara di sisi lain kemiskinan tetap tinggi karena rendahnya daya beli masyarakat secara keseluruhan. Faktanya demikian, daya beli masyarakat Kota Bandung lebih rendah dari Kabupaten Ciamis. Dengan demikian sasaran pembangunan ekonomi yakni maksimisasi *social welfare* tidak tercapai, artinya sesungguhnya pembangunan tidak terjadi atau gagal.

Kasus eksklusif Kota Bandung yang demikian yakni kondisi pelayanan publik buruk namun ekonomi bisa tumbuh tinggi karena kuatnya daya tarik ekonomi kota, bukan berarti aman, karena dalam jangka panjang bisa runtuh. Mengapa demikian? Berdasarkan pemikiran Thurow (1999) tentang piramida kemakmuran yang terdiri dari enam fondasi. Fondasi dasar dari kemakmuran suatu bangsa adalah *social organization*. Aspek ini sangat mendasar karena terkait dengan kemampuan pemerintah mengorganisasi ketersediaan fasilitas publik seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, pengembangan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan demokratisasi, dan fasilitas publik lainnya. Termasuk di dalamnya menyediakan pelayanan publik yang memadai, efisien dan optimal. Ini artinya ketika fondasi dasar tidak terbangun dengan kuat dan mantap maka piramida kemakmuran menjadi rapuh dan rentan bahkan diprediksi tidak akan mampu mencapai sasaran yang diinginkan yakni kemakmuran bersama. Perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia memberikan *lesson learnt* (pembelajaran) yang sangat berarti, ternyata pertumbuhan ekonomi yang mantap di periode awal tahun 1990-an mendorong terjebak dalam krisis yang belum pulih sempurna sampai saat ini karena akar masalah utama yakni lemahnya kelembagaan yang tercermin dalam budaya KKN.

Jika jajaran Pemerintah Kota Bandung memahami makna pembangunan ekonomi secara komprehensif maka sudah sepatutnya menyikapi hasil survey dengan inovasi kelembagaan yang

mengarah pada perbaikan dan peningkatan pelayanan publik sesegera mungkin. Tidak perlu rumusan yang ideal namun klise dan sebatas retorika, mulailah dengan yang sangat sederhana namun konkrit dan jelas, misalnya akses mudah, penetapan batas waktu yang jelas dan pasti, tarif rendah dalam segala urusan administrasi. Hikmah hasil survey merupakan *warning* untuk serius meningkatkan pelayanan publik. KPK akan terus memantau jangan sampai tahun depan tetap teridentifikasi sebagai kota terburuk pelayanan publiknya.

Penulis Ketua Prodi Ilmu Ekonomi UNISBA